



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Buton adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2017 ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2017 sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
PLH - SEKDA	
ASISTEN II	
PLT-KA - BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 16 Maret 2017

PLT. BUPATI BUTON,


LA BAKRY

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	4
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian	Persentase pegawai yang telah menandatangani pakta integritas(%)	100	Inspektorat
	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP(%)	85/95	Inspektorat
Meningkatnya kualitas data dan informasi	Website milik pemerintah daerah (%)	100	Sekretariat Daerah
	Jumlah pameran/expo (Pameran)	6	Sekretariat Daerah
	Sistim Informasi Manajemen Pemda (buah)	31	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan diseminasi atau pendistribusian informasi (%)	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Media Massa seperti majalah, radio dan televisi	8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Buku "Kab/kota dalam angka" (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Buku "PDRB Kab/kota" (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase SKPD yang mempunyai sistem pengumpulan data kinerja terhadap jumlah SKPD (%)	40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pertumbuhan PDRB (%)	13,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PDRB per kapita (%)	11,102	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	16,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya perencanaan pembangunan partisipatif	Persentase aparat Bappeda yang mengikuti pelatihan perencanaan (%)	85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PEJABAT	PARAF
PL. SEK-DA	
ASISTEN II	
PL. KA. BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

PT. BUPATI BUTON,


WA BAKRY

Lampiran : Peraturan Bupati Buton

Nomor : 7 Tahun 2017

Tanggal : 16 Maret 2017

Tentang : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton T.A 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	76,58	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SD/MI/paket A	1,00	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (%)	1,00	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD (%)	98,92	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A (%)	99,88	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,22	Dinas Pendidikan
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,79	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/paket B (%)	0,99	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP (%)	94,93	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs(%)	1,00	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/paket B (%)	99,01	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS (%)	0,54	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/paket C (%)	0,99	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA (%)	83,32	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SMA/MA/SMK (%)	0,99	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / SMK / MA / paket C (%)	99,01	Dinas Pendidikan
	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,93	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,43	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	78,91	Dinas Pendidikan
	Angka melek huruf (%)	96,76	Dinas Pendidikan
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	49,34	Dinas Pendidikan
	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	7,74	Dinas Pendidikan
	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI (per 10.000 Penduduk)	86,94	Dinas Pendidikan
Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar SD/MI (per 10.000 Penduduk)	645,32	Dinas Pendidikan	
Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs (per 10.000 Penduduk)	91,96	Dinas Pendidikan	
Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar SMP/MTs (per 10.000 Penduduk)	1342,54	Dinas Pendidikan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga	Jumlah organisasi kepemudaan	45	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Jumlah kegiatan Kepemudaan	66	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Persentase peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba(%)	0,50	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	25.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (jumlah koleksi buku)	6.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Persentase desa/kel memiliki rumah baca (%)	5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Terwujudnya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip baku (%)	15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Persentase penyebaran informasi kearsipan (%)	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase pengembangan obat tradisional pada puskesmas terpilih(%)	40	Dinas Kesehatan
	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1000 KH)	982	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan usia harapan hidup(UHH) (Thn)	72	Dinas Kesehatan
	Penulisan resep obat generik (%)	100	Dinas Kesehatan
	Rasio posyandu persatuan balita (per 1000 balita)	14	Dinas Kesehatan
	Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	70	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif(%)	80	Dinas Kesehatan
	Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita (%)	<15	Dinas Kesehatan
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemberian MP- ASI anak 6-24 bulan dari keluarga miskin (%)	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas(%)	70	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (%)	40	Dinas Kesehatan
	Prevalensi TBC (per 100.000 penduduk)	215	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA positif (%)	87	Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (ICU) (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita pneumonia balita (%)	72	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare (%)	95	Dinas Kesehatan
	Annual Parasite Incidence (API) Per 1.000 Penduduk	< 1,0	Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan (%)	95	Dinas Kesehatan
	AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun (per100.000 penduduk)	< 5	Dinas Kesehatan
	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) <24 jam (%)	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan dokumen profil kesehatan (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin(%)	1,5	Dinas Kesehatan
	cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (%)	40	Dinas Kesehatan
	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk (per 30.000 penduduk)	3,8	Dinas Kesehatan
	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk (per10.000 penduduk)	2,5	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas (%)	160	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas pembantu (%)	27	Dinas Kesehatan
	Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (%)	99	Dinas Kesehatan
	Puskesmas dengan fasilitas PONED(%)	26	Dinas Kesehatan
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk (per150.000 penduduk)	0,6	Dinas Kesehatan
	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk (per100.000 penduduk)	17	Dinas Kesehatan
	Rasio Bidan terhadap jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	80	Dinas Kesehatan
	Rasio Perawat terhadap jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	148	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kematian Balita	15	Dinas Kesehatan
	Cakupan yankes balita (%)	87	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usa lanjut (%)	75	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4(%)	95	Dinas Kesehatan
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	85	Dinas Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	90	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan nifas (%)	95	Dinas Kesehatan
	Cakupan neonatus resti/komplikasi yang tertangani (%)	90	Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	Cakupan kunjungan Neonatal lengkap (KN3) (%)	90	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi (%)	94	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian bayi (AKB/1.000 KH) (per 1.000 KH)	18	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 KH) (per 1.000 KH)	80	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian neonatal per 100.000 KH	15	Dinas Kesehatan
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkatnya (%)	98	Dinas Kesehatan
	Adanya standar operasional prosedur	Ada	RSUD
	Angka penggunaan tempat tidur / bed	55	RSUD
	Angka rata-rata lama perawatan atau length of stay (LOS)(Hari)	6	RSUD
	Angka selang waktu antara penggunaan tempat tidur atau Turn over internal (TOI)(Hari)	6	RSUD
	Frekwensi pemakaian tempat tidur atau Bed Turn Over Internal (BTO) (kali)	30	RSUD
	Angka kematian netto (Net death rate/ NDR) (%)	1	RSUD
	Angka kematian umum gross death rate (GDR) (%)	1	RSUD
	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (Menit)	≤ 5	RSUD
	Kematian pasien di UGD(kurang atau sama dengan 8 jam)(per 1000)	≤ 2	RSUD
	Kepuasan pasien di UGD (%)	≥ 70	RSUD
	Waktu tunggu rawat jalan (menit)	≤ 60	RSUD
	Kepuasan pasien di poliklinik (%)	≥ 90	RSUD
	Kejadian infeksi pasca operasi (%)	≤ 1,5	RSUD
	Kejadian infeksi nosokomial (%)	≤ 9	RSUD
	Kejadian pulang paksa (%)	≤ 5	RSUD
	Kematian pasien lebih atau sama dengan 48 jam (%)	≤ 0,24	RSUD
	Kepuasan pasien di rawat inap (%)	≥ 90	RSUD
	Waktu tunggu operasi elektif (hari)	≤ 2	RSUD
	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi (%)	100	RSUD
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang(%)	100	RSUD
	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi (%)	100	RSUD
	Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi(%)	100	RSUD
	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET (%)	100	RSUD
	Kejadian kematian di meja operasi (%)	≤ 1	RSUD
	Kepuasan pelanggan di bedah sentral (%)	≥ 80	RSUD
	Kematian ibu karena persalinan :		RSUD
	a. Perdarahan (%)	≤ 1	RSUD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	b. Pre eklamsia (%)	≤ 30	RSUD
	c. Sepsis (%)	≤ 0,2	RSUD
	Kepuasan pasien di persalinan dan perinatalogi (%)	≥ 80	RSUD
	Kejadian infeksi nosokomial (%)	≤ 9,2	RSUD
	Kepuasan pelanggan (%)	≥ 70	RSUD
	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax (jam)	≤ 3	RSUD
	Kerusakan foto (%)	≤ 2	RSUD
	Kepuasan pelanggan di radiologi (%)	≥ 80	RSUD
	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Patologi Klinik (menit)	≤ 140	RSUD
	Kepuasan pelanggan di pelayanan patologi klinik (%)	≥ 80	RSUD
	Kepuasan pelanggan (%)	≥ 80	RSUD
	Waktu tunggu pelayanan obat jadi (menit)	≤ 30	RSUD
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan (menit)	≤ 60	RSUD
	Kepuasan pelanggan di Apotik (%)	≥ 80	RSUD
	Kepuasan pelanggan pelayanan gizi (%)	≥ 80	RSUD
	Tenaga penyedia pelayanan UTDRS (orang)	4	RSUD
	Kepuasan pelanggan (%)	≥ 80	RSUD
	Pemberi pelayanan rekam medis (jumlah)	8	RSUD
	Kepuasan pelanggan di rekam medik (%)	≥ 80	RSUD
	Baku mutu limbah cair		RSUD
	a. BOD (mg/l)	30	RSUD
	b. COD (mg/l)	80	RSUD
	c. TSS (mg/l)	30	RSUD
	d. PH	6 - 9	RSUD
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance (menit)	≤ 30	RSUD
	Waktu Tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit (%)	80	RSUD
	Dokter pemberi pelayanan kesehatan	100	RSUD
Menurunnya jumlah masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	62,5	Dinas Sosial
	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	Dinas Sosial
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	11	Dinas Sosial
	Jumlah anak terlantar yang dibina (Orang)	100	Dinas Sosial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
Meningkatnya Kualitas sumberdaya perempuan dan kesetaraan gender	Jumlah persentase pengusaha perempuan dan laki-laki per tahun	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda (orang)	200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Proporsi lurah / kepala desa perempuan (orang)	14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase camat perempuan (%)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	persentase perempuan sebagai pengurus partai politik (%)	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	persentase perempuan sebagai pengurus organisasi sosial (Orsos)(%)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Jumlah)	2,941	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase sektor yang mempunyai perencanaan dan penyusunan program untuk mengurangi / menghilangkan kesenjangan yang berbasis gender	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase sektor yang dinilai responsif gender dalam pelaksanaan programnya	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah masyarakatan kesetaraan dan keadilan gender melalui media massa cetak dan elektronik per tahun	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase sektor yang mempunyai responsive gender	0,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah penduduk perempuan dan laki-laki (10-44) tahun yang buta huruf per tahun	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah ibu (dalam keluarga) yang tidak usaha pertahun	245,995	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah persentase pengusaha perempuan dan laki-laki per tahun	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah peraturan / ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah kekerasan terhadap perempuan per tahun (kasus)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah perkawinan dengan istri dibawah 16 tahun per tahun	970	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	Jumlah persetase siswa SMU perempuan dan laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi (jurusan	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di jenjang pendidikan di	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di jenjang pendidikan di SMP	76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Angka melek huruf perempuan usia 15th ke atas	200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan anak	Jumlah kegiatan pemasyarakatan hak anak per tahun (keg)	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah peraturan / ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup anak (perda)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya SDM melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	Jumlah peraturan / ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup anak (perda)	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah persentase peserta KB pria per tahun (%)	19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase peserta KB perempuan dibanding laki-laki (%)	300	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi peserta KB aktif (%)	75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi penggunaan kontrasepsi(%)	77	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pelayanan antenatal setidaknya sekali kunjungan (org)	55	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	47,633	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba(%)	0,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	55	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif (%)	55	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	80	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	65	Dinas Tenaga Kerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	65	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran pemeriksaan perusahaan(%)	74	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan (%)	80	Dinas Tenaga Kerja
	Tersedianya lokasi pemukiman transmigrasi baru (PTB)	5	Dinas Transmigrasi
	Transmigran Swakarsa (%)	100	Dinas Transmigrasi
	Persentase kepala keluarga (KK) transmigran umum yang dibina	100	Dinas Transmigrasi
	Persentase transmigrasi umum yang berhasil	100	Dinas Transmigrasi
	Persentase pemenuhan prasarana sosial dan ekonomi	100	Dinas Transmigrasi
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kota/jumlah penduduk(%)	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	kecepatan rata-rata jalan kota(km/jam)	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Luas jalan kota/luas kota (%)	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Ratio panjang jalan lingkungan dengan luas wilayah (%)	1.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Ratio panjang jalan setapak dengan luas wilayah (%)	0.7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	panjang jalan dilalui roda 4 (km)	1.275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik (%)	70.86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi sedang (%)	10.24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi rusak (%)	18.9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jembatan dalam kondisi baik (M')	900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jembatan dalam kondisi sedang (M')	150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jembatan dalam kondisi rusak (M')	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Ratio panjang jalan pedesaan dengan luas wilayah pedesaan (%)	2.7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase ketersediaan peralatan yang layak pakai (%)	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan Air (minimal 1,5 M) (%)	5,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
Meningkatnya pemenuhan data dan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya Perda RT/RW (Perda)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tersedianya dokumen RDTR (Dok)	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tersedianya dokumen RTBL (Dok)	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Ketaatan terhadap RTRW (%)	75,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Luas wilayah produktif (%)	0,493	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Luas wilayah industri (%)	0,0483	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Luas wilayah banjir (%)	0,00275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Luas wilayah kekeringan (%)	0,117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB (%)	6.06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tersedianya data kelayakan jalan	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya / terciptanya pemanfaatan ruang yang baik	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB (%)	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase ruang terbuka hijau yang fungsional (%)	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya pemenuhan data dan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD (ada/tdk)	tdk	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD (ada/tdk)	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Sarana Prasarana Pertanian	Rasio panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	0.61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio panjang irigasi dalam kondisi sedang (%)	0.10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio panjang irigasi dalam kondisi rusak (%)	0.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	cakupan pelayanan irigasi yang teraliri sawah (Ha)	1778	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan	Tingkat debit pelayanan air bersih/orang	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	85,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Lingkungan pemukiman kumuh	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Persentase rumah layak huni	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah tangga/ keluarga berumah tidak layak huni	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kecepatan rata-rata (Km/Jam)	50	Dinas Perhubungan
	Jumlah angkutan darat (jumlah angkutan)	2.342	Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan (%)	100	Dinas Perhubungan
	Uji KIR Angkutan Umum (Jumlah)	1,409	Dinas Perhubungan
	Jumlah penumpang angkutan umum (Penumpang)	612.447	Dinas Perhubungan
	Panjang jalan yang dilayani angkutan umum (%)	100	Dinas Perhubungan
	Kontribusi sektor perhubungan terhadap PDRB (Rp)	216.743,69	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan kebutuhan terminal Type B yang representatif(%)	1	Dinas Perhubungan
	Persentase kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan :		Dinas Perhubungan
	- Quartil (%)	100	Dinas Perhubungan
	- Rambu perintah tabel IIB (%)	100	Dinas Perhubungan
	- Rambu peringatan tabel 1 (%)	100	Dinas Perhubungan
	- Rambu larangan tabel IIA (%)	100	Dinas Perhubungan
	- Rambu petunjuk Tabel III (%)	100	Dinas Perhubungan
- Deliniator (%)	100	Dinas Perhubungan	
Meningkatnya pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran	100	Dinas Pemadam Kebakaran
	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran(%)	9	Dinas Pemadam Kebakaran
	Persentase pengungsi yang ditangani	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase rumah tangga yang tinggal dikawasan rawan bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana alam(%)	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya pengelolaan potensi SDA secara lestari	Tingkat kualitas air minum (%)	90	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Terpantaunya kualitas air sungai dan laut sesuai standar (%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pelayanan pencegahan pencemaran Air	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	100	Dinas Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	Cakupan pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup(%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penegakan hukum lingkungan	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah usaha dan atau kegiatan menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air (100%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
	jumlah usaha dan atau kegiatan menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (100%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang baik	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB (%)	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan perkotaan (%)	34.5	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ruang terbuka hijau yang fungsional (%)	50	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kelautan dan Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (juta)	425.57	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Konsumsi ikan	89,14	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UMKM	Usaha mikro dan kecil (%)	100	Dinas Koperasi dan UKM
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	280	Dinas Koperasi dan UKM
	Peningkatan perkembangan keanggotaan (jumlah absolut dan jumlah relatif) (%)	13.14	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase perbandingan antara jumlah pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi koperasi dengan jumlah koperasi pada suatu wilayah (%)	10.83	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase pembentukan koperasi baru (%)	15	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase Koperasi aktif (%)	100	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase peningkatan SHU (%)	30	Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah dan kemampuan Kelompok Tani (Klp)	250	Dinas Pertanian
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,02	Dinas Pertanian
	Regulasi Ketahanan Pangan (ada/dk)	Ada	Dinas Pertanian
	Ketersediaan pangan utama (Ton)	506.70	Dinas Pertanian
	Regulasi ketahanan pangan (ada/tdk)	Ada	Dinas Ketahanan Pangan
	Ketersediaan pangan utama (Ton)	506.70	Dinas Ketahanan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya ton per hektar	38,99	Dinas Pertanian
	Jumlah dan kualitas penyuluh (%)	100	Dinas Pertanian
	Produksi daging temak (Kg)	350.369	Dinas Pertanian
	Produksi peternakan (ekor/tahun)	100%	Dinas Pertanian
Meningkatnya industri perdagangan usaha industri kreatif	Peningkatan jumlah sentra-sentra industri (%)	5	Dinas Perindustrian
	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	23.00	Dinas Perindustrian
	Persentase IKM produktif (%)	100	Dinas Perindustrian
	Persentase jumlah IKM yang dibina(%)	24,59	Dinas Perindustrian
	Prosentase peningkatan produk-produk unggulan lokal (%)	30	Dinas Perindustrian
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp)	114.964,29	Dinas Perindustrian
	Presentase Sengketa Perdagangan yang diselesaikan (%)	100	Dinas Perdagangan
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Rp)	368,302,70	Dinas Perdagangan
	Tingkat ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder sarana niaga (unit)	5	Dinas Perdagangan
Meningkatnya jumlah investasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Nilai investasi PMA	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	2M	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	2M	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Lama Proses Perizinan (Hari)	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan (%)	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Kepariwisata Daerah	Persentase promosi budaya Untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik(%)	0	Dinas Pariwisata
	Kunjungan wisatawan (Jumlah)	1000	Dinas Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,1	Dinas Pariwisata
	Jumlah Destinasi pariwisata unggulan yang dikelola (buah)	5	Dinas Pariwisata
	Persentase sarana pada obyek wisata(%)	50	Dinas Pariwisata
Meningkatnya apresiasi masyarakat	Persentase ikon buton yang berbasis budaya (%)	0	Dinas Kebudayaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
terhadap budaya dan kearifan lokal	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	Dinas Kebudayaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah lembaga adat yang berperan dalam pembangunan (jumlah lembaga adat)	243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Mengoptimalkan fungsi Baruga/Balai Pertemuan (kec)	21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase LMP berprestasi (%)	23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase peran masyarakat dalam pembangunan (%)	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase keterlibatan pemerintah dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan (%)	7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah LSM (LSM)	40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase PKK aktif (%)	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Posyandu aktif (%)	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Poleksosbud Kantibnas Perlindungan Serta Kedisiplinan Masyarakat	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan (%)	3	Satuan Polisi Pamong Praja
	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	38	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase pengendalian tuntutan masyarakat melalui unjuk rasa (per tahun)	36/36	Satuan Polisi Pamong Praja
	Angka kriminalitas (%)*	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Jumlah PKL yang tertata (jumlah PKL)	746	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase peningkatan stabilitas daerah atas kerja sama dengan aparat pengamanan (KOMINDA)(%)	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Peningkatan kerjasama antar umat beragama (orang)	2.350	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Jumlah Orang Asing yang terpantau (orang)	3.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	60	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu (%)	89.88	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Peningkatan pemahaman antar Pengurus Parpol (orang)	9.030	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
Meningkatnya pemenuhan data dan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah sebagai	Persentase sarana dan prasarana penunjang kelitbang (Lab. Mini)(%)	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Jumlah dokumen hasil litbang bidang pemerintahan, politik, ekososbud, keu dan SDA (dok)	15	Badan Penelitian dan Pengembangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
acuan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah publikasi dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan (Dok)	15	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Tersedianya regulasi menyangkut penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (Perda)	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan (%)	13,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya (kompetensinya) (%)	3,33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Kepangkatan (%)	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan(%)	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Persentase kenaikan pangkat tepat waktu (%)	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Persentase pegawai sesuai kompetensi jabatan	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Terwujudnya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase tingkat ketidakhadiran aparatur (%)	5	Sekretariat Daerah
	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai(%)	100	Sekretariat Daerah
	Persentase pegawai yang telah menandatangani pakta integritas (%)	100	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	39,04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Rasio efisiensi belanja (%)	15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen regulasi pengelolaan keuangan	85	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen regulasi pengelolaan BMD	90	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya PAD (Rp)	28.044.029.177	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Peningkatan proporsi PAD dibandingkan Total Pendapatan (%)	110	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD
1	2	3	6
	Raperda APBD tepat waktu (raperda)	1	Sekretariat Daerah
	Perda APBD tepat waktu (perda)	1	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan layanan masyarakat (ada/tdk)	ada	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang memiliki SPM (%)	100	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai Tupoksinya (%)	100	Sekretariat Daerah
	Luas lahan bersertifikat (%)	100	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian ijin lokasi (%)	3	Sekretariat Daerah
	Jumlah kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah (jumlah KD)	4	Sekretariat Daerah
	Jumlah kerjasama yang ditandatangani (MOU)	5	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Rasio tempat ibadah (Mesjid) (Buah)	509
Rasio tempat ibadah (Gereja) (Buah)		6	Sekretariat Daerah
Rasio tempat ibadah (Pura) (Buah)		5	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan pemerintahan daerah	Kepemilikan KTP (%)	82	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Penerapan KTP nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Sudah	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase masyarakat yang memiliki kartu keluarga (%)	100	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	ketersediaan database skala provinsi	Ada	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kepemilikan akte kelahiran(%)	35	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya pemenuhan Produk Hukum Daerah secara sistematis dan terencana sesuai kebutuhan daerah	Persentase Raperda yang menjadi Perda (%)	100	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Bupati yang diterbitkan(%)	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penerbitan SK Bupati(%)	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Penerbitan Instruksi Bupati (%)	100	Sekretariat Daerah
	Persentase jumlah Perda yang ditetapkan dibanding Perda yang diajukan (%)	84	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum (kasus)	25	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan hukum pada tingkat Kecamatan (Kec)	28	Sekretariat Daerah
	Publikasi perundang- undangan melalui media elektronik (SJDIH) (%)	100	Sekretariat Daerah
	Tersedianya dokumentasi hukum (%)	100	Sekretariat Daerah